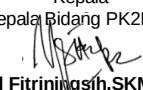


 UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Kepala Bidang PK2PHA  Nurul Fitriingsih, SKM., MPH
Kepala UPT PPA		
Koordinator Pelayanan Pendampingan Penegakan dan bantuan Hukum	Nama SOP	Pelayanan Pendampingan Penegakan dan bantuan Hukum

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 3 SPM Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Layanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 ,Tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kutai Karta Negara Tahun 2016 Nomor 73) 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. 8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 9. Surat Edaran Kementerian dalam Negeri Nomor: 061/4338/OTDA Hal: Pedoman Konsultasi Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD untuk seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota; 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. 11 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembantuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.	1. Memiliki pemahaman tentang tata cara menerima konsultasi 2. Memiliki pemahaman tentang Penyelesaian Kasus 3. Memiliki kemampuan kearsipan 4. Memiliki pemahaman tentang aturan Hukum
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Pelayanan Pendampingan Penegakan dan bantuan Hukum	1. Formulir 2. Surat Persetujuan 3. Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excel) dan sejenisnya. 4. Buku Pengarsipan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Penerimaan Pelayanan Pendampingan Penegakan dan bantuan Hukum	Data Pelayanan Pendampingan Penegakan dan bantuan Hukum